

**OPTIMALISASI SINERGITAS TNI, POLRI DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA  
DALAM PENANGGULANGAN KELOMPOK TERORIS PAPUA GUNA  
MEWUJUDKAN KEUTUHAN NKRI**

Oleh

**Rantau Isnur Eka<sup>1)</sup>, Rizerius Eko Hadisancoko<sup>2)</sup>, Lukman Yudho Prakoso<sup>3)</sup>**  
**<sup>1,2,3</sup>Prodi Strategi dan Kampanye Militer-Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas  
Pertahanan RI**  
**Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul Bogor Jawa Barat**  
**Email: [1kamalekumdeplek@gmail.com](mailto:kamalekumdeplek@gmail.com)**

**Abstrak**

Situasi keamanan di Papua belakangan ini kembali menunjukkan eskalasi dan cenderung memanas. Menanggapi eskalasi dan kekerasan yang terjadi di Papua beberapa waktu ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah telah mengkategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, dan yang mendukung gerakan tersebut, sebagai teroris. Situasi keamanan yang meningkat di wilayah Papua menjadi urgensi diperlukannya pendekatan yang komprehensi antara TNI, Polri, Satkowil, Pemda, K/L untuk bersinergi dalam rangka meredam konflik Papua. Teori yang digunakan dalam menganalisa persoalan ini adalah teori optimalisasi, sinergisitas, kontra insurjensi, konsep terorisme, dan konsep pertahanan negara. Metode yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, berdasarkan pengalaman peneliti selama bertugas di Papua. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sinergisitas antara lembaga / kementerian telah terselenggara baik dalam bentuk dialog, pendekatan soft power dalam kerangka OMSP, maupun pemberdayaan terhadap masyarakat setempat dengan bersinergi bersama pemerintah lokal. Namun, dengan masih berlangsungnya konflik dan beberapa eskalasi yang terjadi, hal ini menunjukkan sinergisitas tersebut masih belum cukup optimal.

**Kata Kunci: Papua, Sinergisitas, Teroris, Kementerian/Lembaga, Kelompok Kriminal Bersenjata**

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang dianugerahi dengan masyarakat yang plural dan memiliki heterogenitas etnik. Keberagaman tersebut secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat dan primordialisme. Dengan struktur sosial yang sedemikian kompleks, Indonesia dihadapkan kepada potensi ancaman permasalahan konflik antar etnik, kesenjangan sosial dan tantangan terhadap keutuhan NKRI. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah NKRI sebagai suatu bangsa dan negara yang berdaulat, Tentara

Nasional Indonesia (TNI) sebagai komponen utama Sistem Pertahanan Negara bersama rakyat telah melaksanakan beberapa upaya pertahanan negara. Upaya ini dimulai dari penumpasan pemberontakan pada peristiwa PKI di Madiun (1948), pemberontakan DI/TII (1950), Pembebasan Irian Barat (1961), Operasi Dwikora (1963), Penumpasan G30S/PKI (1965), dan Operasi Seroja (1974-1999) [1]

Situasi keamanan di **Papua** belakangan ini kembali menunjukkan eskalasi dan cenderung memanas. Berbagai aksi unjuk rasa menolak status otonomi khusus (Otsus) hingga berbagai insiden penembakan akibat konflik

bersenjata terus memakan korban jiwa, baik dari warga sipil, tokoh masyarakat hingga aparat keamanan. Terkait kontak senjata ini, TNI sempat merilis hal tersebut dilakukan Kelompok Teroris sebutan yang disematkan pada Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) bertujuan mencari perhatian untuk Sidang Umum PBB. Lalu, bulan September tahun 2020 sejumlah aksi demonstrasi menolak Otsus juga marak terjadi di Papua, salah satunya unjuk rasa menolak penerapan otonomi khusus Papua Jilid II di sekitar Universitas Cendrawasih, Jayapura, Papua.

Dari berbagai persoalan yang terjadi di Papua dan beberapa uraian mengenai pendekatan yang dapat dilakukan di wilayah tersebut, maka dapat dilihat bahwa sinergisitas antar lembaga, dalam hal ini K/L terkait, Kepolisian dan TNI merupakan sesuatu yang diperlukan di Papua. Melalui pendekatan ini, diharapkan penyelesaian konflik di wilayah tersebut dapat optimal dan komprehensif, sehingga dapat menyentuh akar persoalan penyebab konflik. Sebagaimana merujuk pada konsep sistem pertahanan negara Indonesia yang menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata), maka dalam hal ini TNI dan Kepolisian negara Republik Indonesia memegang peranan penting sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.[2] Sishankamrata ini dalam implementasinya melibatkan seluruh unsur guna mewujudkan pertahanan negara. Dalam halnya persoalan Papua, maka implementasi sishankamrata dapat terwujud melalui sinergisitas antar lembaga baik TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga dalam upaya mejudukan keutuhan NKRI di Papua. Hal inilah yang kemudian peneliti bahas dan analisa pada bagian selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Teori ini digunakan guna menganalisis tindakan, proses, atau metodologi oleh TNI, Polri, beserta Kementerian/Lembaga dalam

menanggulangi konflik yang masih berlangsung di Papua. Teori ini diperlukan untuk menganalisis signifikansi dan indikator keberhasilan sinergisitas antara Polri, beserta Kementerian/Lembaga dalam upayanya menyelesaikan konflik di Papua melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Dengan demikian, pada hasil penelitian dapat diidentifikasi apakah upaya aparat bersama dengan K/L dapat terwujud sesuai dengan tujuan. Menurut *A.F. Stoner* dan *Charles Wankel* [3], tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan output yang lebih besar dari penjumlahan hasil kinerja masing-masing pihak. Menurut *Stephen Covey* [4], sinergi didefinisikan sebagai proses kreatif yang terwujud ketika dua pihak bersama-sama melakukan negosiasi serta *brainstorming* untuk mencapai solusi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Sugiyono mamaparkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena [5].

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran TNI dan POLRI dalam pemberantasan terorisme di Papua dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI ditinjau dari perspektif pembaharuan hukum pidana berorientasi pada kebijakan dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai, namun tetap harus mengedepankan prinsip *law enforcement*. Orientasi pada kebijakan dapat

dilihat pada pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan penerbitan Perpres yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Orientasi pada nilai, adalah bahwa pelibatan TNI dan POLRI ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai, kemanusiaan dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas serta memiliki tujuan tertentu.[6]

Selain pendekatan ekonomi, hal yang lebih mendesak adalah pemerintah harus memecahkan akar penyebab konflik Papua, yang hingga sekarang masih belum terselesaikan. Hal ini sesuai dengan teori-teori tentang kontrainsurgensi atau penumpasan pemberontakan, yang melihat bahwa akar masalah pemberontakan biasanya tidak hanya terkait politik atau wilayah teritorial. Lebih dari itu, suatu pemberontakan cenderung berkembang dalam kondisi represi ideologi, agama, etnis, budaya, hingga ekonomi [7]. Oleh karena itu, negara yang melakukan kontrainsurgensi harus menggunakan strategi dan program untuk memenangkan dukungan rakyat dalam mengalahkan pemberontakan (*winning hearts and minds*) untuk melegitimasi pengaruh negara. Seperti dirumuskan oleh pakar kontrainsurgensi Prancis, David Galula, kontrainsurgensi ideal adalah 20% aksi militer dan 80% politik untuk memenangkan dukungan rakyat tersebut.19 Penggunaan kekuatan militer yang berlebihan justru cenderung kontraproduktif, karena dapat menyebabkan korban sipil dan menurunkan legitimasi pemerintah.[8]

Polri sendiri semenjak tahun 2019 hingga saat ini telah menerbitkan 3 (tiga) Surat Perintah penugasan guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di

wilayah Papua dengan sandi operasi Nemangkawi dalam rangka penegakan hukum terhadap gangguan keamanan yang ditimbulkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) [9]. Rangkaian peristiwa gangguan keamanan berupa teror bom, penculikan, pembunuhan terhadap aparat keamanan dan masyarakat termasuk perusakan dan pembakaran fasilitas umum yang terjadi di wilayah Papua dibarengi dengan penyerangan terhadap markas kepolisian di Papua, memberikan gambaran betapa rawan dan berat tugas kepolisian yang diemban oleh Polda Papua dengan dibantu BKO satuan lainnya seperti Korbrimob Polri dalam mewujudkan akuntabilitas Polri selaku aparat negara penegak hukum, pelayan dan pelindung masyarakat yang profesional dan mampu diandalkan.[10]

Mengacu kepada Pasal 15 ayat 1 huruf (b) UU Kepolisian yang menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan tugasnya kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Upaya-upaya penyelesaian perselisihan atau konflik sendiri telah sedemikian rupa diatur di dalam UU Penanganan Konflik Sosial yang meliputi : penghentian kekerasan fisik; penetapan Status Keadaan Konflik; dan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI[11]. Dalam konteks ini sinergisitas antara TNI dan Polri merupakan poin penting guna keberhasilan operasi keamanan di Papua.[12]

Dalam rangka mengoptimalkan kerjasama antara TNI dan Polri dalam penanganan isu Papua, terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan. *Pertama*, peningkatan dukungan *stakeholders* terhadap pelibatan TNI-Polri, melalui penyusunan dan penerbitan peraturan sebagai pedoman yang mengatur tentang tugas TNI-Polri dalam menangani KKB di Papua, peningkatan pemahaman yang sama mengenai tugas penanganan KKB di

Papua, melaksanakan pemenuhan sarana dan prasarana, dengan metode penetapan, pengkajian, koordinasi, instruksi, penyusunan, penerbitan, evaluasi, pengusulan, diskusi, revisi, pengesahan, sosialisasi, dan kerja sama serta menggunakan sarana berupa rapat bersama, format kerjasama konfigurasi, kerjasama dengan kementerian terkait, universitas kelompok pemerhati konflik sosial dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan peningkatan dukungan *stakeholders* terhadap pelibatan TNI-Polri dalam penanganan KKB di Papua.[13]

*Kedua*, peningkatan sinergitas konsep operasi yang digelar Satgas TNI-Polri, melalui perumusan mekanisme, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program TNI-Polri dalam penanganan KKB di Papua, peningkatan kerja sama Satgas Tindak, Satgas Gakkum, dan Satgas Humas, dengan metode koordinasi, penyuluhan, komunikasi, kerjasama dan sosialisasi dengan menggunakan sarana berupa rapat koordinasi, latihan bersama, pendidikan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan peningkatan sinergitas konsep operasi yang digelar Satgas TNI-Polri guna penanganan KKB di Papua [14].

*Ketiga*, penerapan pendekatan *soft power* yang digunakan TNI-Polri, melalui pelurusan sejarah masuknya Papua ke Indonesia, melaksanakan kegiatan kontra propaganda dan internasionalisasi Papua dengan metode koordinasi, penyuluhan, komunikasi, kerjasama dan sosialisasi dengan menggunakan sarana berupa rapat bersama, lembaga pendidikan, komunitas sosial kreatif, kebijakan maupun peraturan, pendidikan politik dan forum diskusi dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan penerapan pendekatan *soft power* yang digunakan TNI-Polri guna penanganan KKB di Papua [15].

Terakhir, yaitu meningkatkan kolaborasi peranan TNI-Polri dengan pranata sosial dalam pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan wawasan kebangsaan kepada

masyarakat Papua, peningkatan 2794endidika TNI-Polri dengan Pranata Sosial di Papua dengan metode komunikasi, koordinasi, 2794endidika, diskusi, revisi, sosialisasi, dan evaluasi, menggunakan sarana berupa program orang tua asuh, forum kemasyarakatan, Ormas NKRI di Papua, Organisasi kepemudaan, kampung binaan dan pihak ketiga dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan peningkatan kolaborasi peranan TNI-Polri dengan pranata sosial dalam pemberdayaan masyarakat guna penanganan KKB di Papua.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sinergitas TNI-Polri dengan komponen bangsa lainnya saat ini telah diselenggarakan dalam bentuk dialog yang dilakukan antara kementerian dan 2794endidi. Kemudian adanya penanganan *soft power* yang digunakan TNI-Polri sebagai bentuk kolaborasi dalam kerangka OMPS TNI, dan jalinan 2794endidika antara pemerintah pusat dengan daerah 2794endidi dengan masyarakat setempat dalam bentuk pemberdayaan. Namun demikian, sinergitas TNI-Polri dengan segenap komponen bangsa lainnya masih belum dapat menangani ancaman KKB di Papua.
- b. Sinergitas konsep operasi yang digelar Satgas TNI-Polri dalam menangani ancaman KKB di Papua belum terjalin dengan optimal. Hal ini disebabkan Pola komunikasi yang baru terbangun antara Satgas TNI-Polri hanya komunikasi *respectful*. Sehingga antara Satgas Tindak, Satgas Gakkum, dan Satgas Humas masih cenderung berdiri sendiri-sendiri. Akibat dari belum terbentuknya sinergitas konsep operasi

yang digelar Satgas TNI-Polri maka akan menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran pokok sehingga pelaksanaannya akan meleset dari waktu yang telah direncanakan. Dengan demikian penanganan ancaman KKB yang dilakukan oleh TNI-Polri 2795endidi komponen bangsa lainnya selama ini, belum menyentuh pada pokok persoalan, termasuk mengatasi faktor-faktor penyebab konflik Papua itu sendiri. Dalam hal ini maka peningkatan sinergitas konsep operasi yang digelar Satgas TNI-Polri merupakan solusi penting yang harus segera diwujudkan oleh Pemerintah dalam upaya menangani ancaman KKB. Solusi tersebut diwujudkan melalui peningkatan sinergitas konsep operasi yang digelar Satgas TNI-Polri, melalui perumusan mekanisme, pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas program TNI-Polri dalam penanganan KKB di Papua, peningkatan kerja sama Satgas Tindak, Satgas Gakkum, dan Satgas Humas, dengan metode koordinasi, penyuluhan, komunikasi, 2795endidika dan sosialisasi dengan menggunakan sarana rapat koordinasi, 2795endidi 2795endidi, 2795endidikan terintegrasi dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan peningkatan sinergitas konsep operasi yang digelar Satgas TNI-Polri guna penanganan KKB di Papua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kep Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tentang Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma.
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- [3] Scott Moore. (2007). *The Basics of Insurgency* dalam <http://smallwarsjournal.com>, 8 September 2007., pada 12 Mei 2021.
- [4] Chauvel, D. (2005). *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity and Adaptation*. Washington: East-West Center.
- [5] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- [6] Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- [7] Dipua, A., Harahap, N., Puspitawati, D., Aminuddin, F., Prakoso, L. Y., Brawijaya, U., & Pertahanan, U. (2021). Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict. *ITALIENISCH*, 11(2), 120–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.1115/italienisch.v11i2.103>
- [8] Harris, A., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Strategi Pertahanan Laut dalam Rangka Ancaman Keamanan di Alur Laut Kepulauan Indonesia II. *Journal of Social and Political Sciences*, Vol.4 No.2 (2021), 5(1), 15–30. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.283>
- [9] Junaidi, M. E., Prakoso, L. Y., Eka, M., & Yudho, L. (2021). Pancasila as the Basis for Indonesia's Universal Defense. *Journal of Social and Political Sciences*, 4(2), 148–154. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.283>
- [10] Kasih Prihantoro, Arif Darmawan, Zakariya ., Lukman Yudho Prakoso, & Kasih Prihantoro Zakariya ., Lukman Yudho Prakoso, A. D. (2019). Implementation Study of Public Policies, Synergy of Policy for Defense Area and National Area Spatial in Grati Pasuruan. *Public Policy and Administration Research*, 9(Public Policy and Administration Researc), 33–39. <https://doi.org/10.7176/PPAR/9-11-04>

- [11] Arief, R., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). UNDERSTANDING NATIONAL IDENTITY TO CREATE LOVE AND PROUD OF BEING A PART OF THE INDONESIAN NATION. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2549–2556. <https://doi.org/https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.518>
- [12] Lukman Yudho Prakoso, Suhirwan, Kasih Prihantoro, Asep Iwa Soemantri- Editor: Budi Pramono, R. (2021). *Bahan Ajar Kebijakan Pertahanan Laut* (R. Budi Pramono (Ed.); 1st ed.). Unhan Press
- [13] Madrohim, M., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2021). Journal of Social and Pancasila Revitalization Strategy in the Era of. *Journal of Social and Political Sciences*, Vol.4 No.2 (2021), 4(2), 155–164. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.04.02.284>
- [14] Lebo, D., Midhio, I. W., & Prakoso, L. Y. (2021). Comparison of The Indonesia Guerrilla War In The Perspective of The Universal War. *Journal Of Sosiasl Sciense*, 2. <https://doi.org/https://jsss.co.id/index.php/jsss/article/view/122>
- [15] Kusuma, A. W., Lukman Yudho Prakoso, & Sianturi, D. (2021). THE COOPERATION BETWEEN FLEET I COMMAND AND INDONESIAN MARITIME SECURITY AGENCY IN ELIMINATING TRANSNATIONAL CRIME IN THE MALACCA STRAIT. *International Journal of Education and Social Science Research*, 4(03), 51–61. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37500/IJESSR.2021.4305>